

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN TORAJA UTARA

Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra

E-mail: olgayanisinkali@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atas Pendapatan, Belanja dan pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini, evaluasi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan, belanja, pembiayaan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).

ABSTRACT:

The purpose of this research was to evaluate the application of Governmental Accounting Standards for income, Expenditure and financing at Department of Revenue and Financial Management of Local Asset (DPPKAD) of Toraja Utara Regency. Governmental Accounting Standards is the accounting principles applied in preparing and presenting the financial statements of central government and local government.

This research was a case study that used financial statements of Toraja Utara Regency of 2013. Based on this research, The evaluation which includes the recognition, measurement, disclosure and presentation of revenues, expenditures and financing on DPPKAD of Toraja Utara Regency is in accordance with the Government Accounting Standards (SAP) applicable.

Keywords: Governmental Accounting Standards (SAP), revenues, expenditures, financing, Department of Revenue and Financial Management of The Local Asset (DPPKAD).

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik tersebut dibutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan yang *accountable* dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut (Subaweh dan Nugraheni 2008), “Salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2005:134) menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia” (dalam Kusumah, 2012. P.2).

Sistem Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu penyusunan Laporan Keuangan SKPD harus dilakukan sebaik mungkin. Transaksi yang terjadi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi pada level pemda dimana sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah.

Menurut (Kusumah 2012) “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CLAK) yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang terletak di Kabupaten Toraja Utara sebagai pelaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab laporan keuangan atas realisasi dana yang didapatkan pemerintah daerah, harus membuat laporan keuangan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya khususnya untuk sistem akuntansi daerah yang didasarkan atas SAP.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara.”**

Berdasarkan identifikasi masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap pendapatan dan pengeluaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten (DPPKAD) Toraja Utara dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara dalam menyusun laporan keuangan dalam kapasitas sebagai SKPKD sudah sesuai dengan SAP atau tidak.

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

a. SAP Berbasis Akrua

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. b. SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

Penerapan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan secara bertahap dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Kas menuju Akrua yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrua tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014.

Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrua digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrua

Dalam SAP berbasis kas menuju akrual, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 84-96

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

- b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 98-99

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

- c. Penyajian Laporan Keuangan Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- Menyediakan informasi perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Dll.

- d. Pengungkapan Laporan Keuangan Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;

- Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- Mata uang pelaporan;
- DII

Penerapan SAP atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Akuntansi Pendapatan dalam PSAP Nomor 02 paragraf 22-30

Informasi yang terdapat dalam Akuntansi pendapatan adalah Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Akuntansi Belanja PSAP Nomor 02 Paragraf 31-40

Informasi yang terdapat di dalam akuntansi belanja adalah belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

- Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

c. Akuntansi Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 50

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

d. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 51-53

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

e. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan PSAP 02 Paragraf 55-57

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum

Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai

pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011, pemerintahan daerah Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membentuk peraturan daerah (Perda) dengan persetujuan bersama DPRD dan juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). SKPKD selain menjadi pengguna anggaran/pengguna barang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, SKPKD dipimpin oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Kepala SKPKD yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). DPPKAD sebagai PPKD bertugas untuk membuat laporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan akuntansi yang mendasari DPPKAD dalam penyusunan laporan keuangannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun laporan keuangan yang disusun DPPKAD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan yang disajikan berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi yang disusun.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh DPPKAD adalah :

- Basis kas, basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas ini digunakan untuk pengakuan untuk pengakuan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Basis akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan atas aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah:

- Pendapatan dicatat berdasarkan nilai kotor, tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh pendapatan neraca.
- Belanja dicatat berdasarkan nilai kotor tanpa dikurangi besaran yang diperlukan untuk memperoleh barang /jasa tersebut.
- Aset dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran yang digunakan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah.

Kajian Penelitian Terdahulu

Socrates, Jance dan Heince (2014) dalam penelitiannya mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPPKAD Pemkab Talaud telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik, sesuai dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan penerapan SAP pada Dinas Pendapatan Daerah. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 14) adalah merupakan

metode analisis yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana peneliti berusaha untuk menggali bagaimana penerapan SAP pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2013 yang dibuat oleh DPPKAD selaku Kepala SKPD (PPKD).

Sumber data penelitian ini berasal dari bagian internal DPPKAD khususnya data bagian akuntansi yang menyusun bagian laporan keuangan pemerintahan daerah. Data yang diperoleh berupa Neraca Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013, LRA bagian unit organisasi DPPKAD, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan dan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Data-data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana penerapan standar yang ditetapkan pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan daerah berupa SAP pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara.

Instrumen dan Pengumpulan Data

Alat atau instrumen yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data untuk penyusunan penelitian ini berupa dokumen dan Peraturan Bupati terkait laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data-data yang diperlukan berupa dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.
- Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian. Informan yang bersangkutan dalam masalah penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SAP atas pendapatan dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan DPPKAD Kabupaten Toraja Utara yang meliputi prosedur pengakuan, pengukuran, definisi elemen dan pos dan penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan yang disusun oleh DPPKAD selaku PPKD.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan data-data yang telah didapat dari Dinas yang bersangkutan.

Data yang diperoleh dihubungkan dengan teori yang menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan Dinas tersebut kemudian diadakan pembahasan masalah yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan pada dinas yang bersangkutan melalui studi literatur yang meliputi penerapan prosedur akuntansi untuk pendapatan, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas.
- Melakukan wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan dinas yang bersangkutan.
- Menarik kesimpulan atas hasil penelitian berupa sesuai tidaknya penerapan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta memberikan saran perbaikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan diresmikan pembentukannya pada tanggal 26 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Toraja Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari 21 kecamatan, 40 kelurahan dan 111 lembang/desa dan beribu kota di kecamatan Rantepao.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2011, terdapat tiga sektor ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian yaitu sektor pertanian, sektor

perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor Pertanian memegang peranan utama sebagai penyumbang terbesar pendapatan bagi Kabupaten Toraja Utara disusul sektor perdagangan kedua dan ketiga yakni sektor jasa-jasa sedangkan penerimaan dari hotel dan restoran menempati urutan terakhir.

Tugas dan Wewenang DPPKAD Kabupaten Toraja Utara selaku Kepala SKPKD

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 7 diatur mengenai tugas dan wewenang dari DPPKAD sebagai Kepala SKPKD.

- A. Tugas DPPKAD Kabupaten Toraja Utara adalah:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Dll
- B. Wewenang DPPKAD Kabupaten Toraja Utara adalah :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Dll;

Deskripsi Data

Bagian ini akan menampilkan data laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD Kabupaten Toraja Utara selaku PPKD yang berwenang membuat dan menyusun laporan keuangan daerah. Data yang diperoleh antara lain: Jurnal Umum 2013, Buku Besar Tahun 2013, Buku Besar Pembantu Tahun 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2013, Neraca Tahun 2013, Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2013 dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2013. Dasar penyusunan laporan keuangan daerah tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA ini, memuat mengenai informasi realisasi dan anggaran entitas akuntansi secara tersanding. sehingga melalui LRA dapat dilihat perbandingan antara anggaran yang terealisasi dengan anggaran awal yang direncanakan pemerintah.

Neraca

Neraca dibuat oleh DPPKAD selaku PPKD yang berwenang menyusun laporan keuangan daerah. Dalam Neraca yang disusun ini mengandung informasi mengenai posisi keuangan entitas akuntansi yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2013.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas dibuat untuk menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dalam hal ini data yang diteliti adalah Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini menyajikan seluruh informasi yang terkait dengan Laporan Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengguna terhadap materi yang termuat dalam Laporan Keuangan tersebut dengan memberikan penjelasan secara terinci mengenai substansi materi APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013.

Penerapan SAP atas Laporan Keuangan yang di Susun Oleh DPPKAD

A. Pengakuan Pendapatan pada DPPKAD

Dalam menjalankan program-program yang sudah dianggarkan setiap periode, pemerintahan daerah membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Sumber-sumber pendapatan dana untuk membiayai APBD yang disusun setiap tahunnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pengakuan Pendapatan dari PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- Pendapatan pajak daerah

Sumber penerimaan daerah dari PAD berupa pajak daerah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 6.589.276.945,00. Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dari Wajib Pajak.

- Pendapatan retribusi daerah

Penerimaan PAD berupa pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp 6.980.065.160,00. Penerimaan retribusi adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Toraja dari wajib retribusi.

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Dalam tahun anggaran 2013 jumlah pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 1.161.155.967,00.
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan PAD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam tahun anggaran 2013, Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp 5.094.280.235,37.

Contoh salah satu jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan atas PAD yang diterima Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Februari 2013, Bendahara Penerimaan di DPPKAD mencatat penerimaan PAD dari pajak hotel bintang I, II, III dan IV, pajak hotel melati I, II dan III, pajak restoran dan pajak cafe. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 117.674.634,00
Rek. PAD	Rp 117.674.634,00
Kas di Bend Penerimaan	Rp 117.674.634,00
Pendapatan Ditangguhkan	Rp 117.674.634,00

Jurnal diatas menunjukkan kas di Bendahara Penerimaan di debet sebesar Rp 117.674.634,00 saat Bendahara Penerimaan telah menerima kas atas pembayaran PAD tersebut dan mengkredit pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 117.674.634,00. Atas penerimaan PAD yang diterima oleh Bendahara Penerimaan diakui sebagai Pendapatan yang ditangguhkan apabila belum di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pendapatan yang ditangguhkan dikredit karena kasnya belum di transfer ke rekening kas daerah.

Pengakuan pendapatan oleh DPPKAD atas pendapatan dari pajak daerah diakui ketika kas telah diterima di RKUD. Saat kas telah ditransfer ke rekening PAD, Rekening PAD bertambah sebesar Rp 117.674.634,00 di debet, sedangkan kas di Bendahara Penerimaan berkurang sebesar Rp 117.674.634,00 di kredit.

b. Pengakuan Pendapatan dari Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi.

Total penerimaan daerah Kabupaten Toraja Utara dari pendapatan transfer tahun 2013 adalah sebesar Rp 595.393.439.887,86. Transfer Pemerintah Pusat terbagi 2 yakni berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Yang kedua transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana penyesuaian.

Transfer pemerintah provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya dan pendapatan transfer provinsi lainnya. Pendapatan bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terdiri dari:

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat ada pengakuan dari pendapatan transfer:

Pada tanggal 13 Juni 2013, DPPKAD menerima transfer dari Pemerintah Pusat berupa dana bagi hasil SDA pertambahan umum iuran tetap (*Landrent*) Triwulan II tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 713.580,00. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 713.580,00
Rek. PAD	Rp 713.580,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 713.580,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp 713.580,00

Jurnal Kas di bendahara Penerimaan di debet sebesar Rp 713.580,00 apabila ada aliran dana masuk ke rekening kas Bendahara Penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa transfer bagi hasil PBB dan mengkredit Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp 192.053.225,00 apabila kasnya belum ditransfer ke RKUD. Setelah dana ditransfer ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan, Rekening PAD di debet sebesar Rp 713.580,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan di kredit sebesar Rp 713.580,00.

c. Pengakuan Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah tahun 2013 adalah sebesar Rp 6.341.657.500,00. Bendahara Penerimaan mencatat adanya pendapatan lain-lain yang sah apabila kas telah masuk ke rekening daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Contoh salah satu jurnal yang dibuat pada saat ada pengakuan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah:
Pada tanggal 31 Desember 2013, DPPKAD menerima transfer bantuan sisa dana hibah dari Pemilukada dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai UU no.28 Tahun 2008. Jurnal umum yang dibuat DPPKAD sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 100.000.000,00
Rek. PAD	Rp 100.000.000,00
Pend yang Ditangguhkan	Rp 100.000.000,00